

**[SIARAN PERS]**

**Deadline Usul KP April 2017 Berakhir 28 Februari 2017, Ada 49 Instansi Belum Usulkan**

Sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 25 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler PNS dan Surat Kepala BKN Nomor D 26-30/V 127-6/99 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Batas Waktu Penerimaan usul kenaikan pangkat (KP) PNS Tahun 2017, telah ditetapkan bahwa KP periode April 2017 diterima BKN mulai Januari 2017 hingga 28 Februari 2017.

Data BKN per 20 Februari 2017 menunjukkan terdapat 29 Instansi Pusat dan 20 instansi daerah yang belum mengusulkan PNS-nya yang KP per 1 April 2017 mengingat batas waktu pengusulan KP periode April 2017 akan habis pada 28 Februari 2017 mendatang. Ke-49 instansi pusat/daerah tersebut tercatat sama sekali belum mengusulkan nominatif PNS yang KP April 2017.

Berikut daftar instansi pusat dan daerah yang belum mengusulkan sama sekali nominatif PNS yang akan KP periode April 2017:

No	Instansi Pusat	Instansi Daerah
1	Badan Intelijen Negara (BIN)	Aceh
2	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Sumatera Utara
3	Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	Sumatera Barat
4	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Riau
5	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Kepulauan Riau
6	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	Jambi
7	Badan Pusat Statistik (BPS)	Sumatera Selatan
8	Badan SAR Nasional	Bangka Belitung
9	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan	Bengkulu
10	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Jawa Barat
11	Kementerian Koordinator Bidang	Nusa Tenggara Timur

	Politik, hukum, dan Keamanan	
12	Kementerian Lingkungan Hidup	Kalimantan Barat
13	Kementerian Luar Negeri	Kalimantan Tengah
14	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI	Kalimantan Timur
15	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sulawesi Tengah
16	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Sulawesi Selatan
17	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	Gorontalo
18	Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)	Maluku
19	Ombudsman RI	Papua Barat
20	Perpustakaan Nasional	Papua
21	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	
22	Sekretariat Jenderal DPD	
23	Sekretariat Jenderal DPR	
24	Sekretariat Jenderal Kabinet	
25	Komnas HAM	
26	Mahkamah Konstitusi	
27	Dewan Ketahanan Nasional (Wamtannas)	
28	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)	
29	Badan Standarisasi Nasional (BSN)	

*Sumber: Direktorat Pengadaan & Kepangkatan BKN*

BKN juga menetapkan bahwa setiap usul KP yang tidak lengkap akan diberitahukan melalui situs Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) *On-Line*. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak dilengkapi maka berkas usul akan dikembalikan untuk diusulkan kembali pada periode berikutnya, setelah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya untuk batas akhir penyampaian berkas KP periode April 2017 berlangsung hingga 21 Maret 2017.

Jakarta, 24 Februari 2017,

Kepala Biro Hubungan Masyarakat,

Mohammad Ridwan